



tribunjogja.com

HARIAN PAGI

Tribun Jogja

SPIRIT BARU DIY-JATENG

ECERAN Rp2.000 • LANGGANAN Rp55.000 • ILMU IKLAN - LANGGANAN: 0851 021 22000 0274-557687 EXT 219

A PART OF TRIBUNNEWS.COM

SABTU LEGI

8 FEBRUARI 2025
9 SYABAN 1446
NO 4909/TAHUN 14

MALIOBORO UNTUK RAKYAT

Pedagang Blokade Jalan Malioboro, Berakhir Bentrok dan Baku Hantam

YOGYA. TRIBUN - Para eks pedagang Teras Malioboro (TM) 2 yang kini berada di lokasi baru di Kelandan dan Beskalan kembali menggelar aksi unjuk rasa, Jumat (7/2) di depan gedung DPRD DIY, Jalan Malioboro, Kota Yogyakarta. Aksi damai itu berakhir ricuh setelah para pedagang bentrok dan baku hantam dengan sekelompok massa.

Bentrokan bermula ketika para pedagang bersama Aliansi Rakyat untuk Demokrasi (ARUS) menggelar unjuk rasa dan memblokade Jalan Malioboro. Kemudian, sekelompok massa datang tiba-tiba dan terjadilah gesekan dan terjadi adu hantam. Massa itu merasa kesal karena aksi blokade oleh pedagang itu mengganggu wisatawan dan aktivitas perekonomian.

"Bubar ra koe (kalian mau bubar ti-
● ke halaman 7

DUDUK - Aksi unjuk rasa para eks pedagang Teras Malioboro (TM) 2 dengan meblokade ruas Jalan Malioboro di depan gedung DPRD DIY, Jumat (7/2). Aksi itu berakhir ricuh karena serangan sekelompok massa yang terganggu dengan unjuk rasa tersebut.

WUJUDKAN LATA KOTA DEMOKRATIS: TOLAK MARIYANU DUNIA YG MENGUSUR RAKYAT

DPRD DIY TIDAK BERSAMA MENDUKUNG RAKYAT

Pedagang Blokade

• Sambungan Hal 1

dak)? Kene yo podo wae golek mangan (kami juga sama-sama mau mencari makan/penghasilan)." teriak seseorang dari kelompok massa tersebut.

Petugas kepolisian dan Satpol PP yang berjaga di lokasi kemudian melera dua kubu. Para peserta massa aksi lantas diminta masuk ke kompleks DPRD DIY sampai situasi kondusif. Kapolresta Yogyakarta Kombes Pol Aditya Surya Dharma, mengatakan, para eks PKL TM 2 itu merupakan anggota Koperasi Tri Dharma yang sebelumnya berjualan di TM 2. Mereka menyampaikan aspirasi terkait proses relokasi PKL TM 2 yang dianggap tidak berpihak kepada para pedagang, khususnya mengenai transparansi relokasi.

"Kronologinya tadi habis salat magrib kemudian ada kelompok-kelompok pelaku usaha Malioboro merasa terganggu karena aksi teman-teman mahasiswa maupun kelompok PKL Tri Dharma orasi di DPRD yang menutup jalan," katanya, kepada awak media.

Terkait adanya korban luka-luka, Aditya masih akan melakukan pengecekan kepada seluruh pihak yang mengalami luka akibat bentrokan tersebut. Pihaknya juga akan mengawal kepulangan para peserta aksi damai dan menjamin keselamatannya dari gangguan kekerasan susulan dari oknum-oknum yang tak dikenal.

Tuntut kepastian

Semula, aksi damai pedagang itu dilakukan di jalur pedestrian atau depan Gedung DPRD DIY sekitar pukul 14.30 WIB. Namun kare-

na tak kunjung ditemui oleh anggota DPRD DIY, massa kemudian melakukan blokade jalan Malioboro mulai pukul 15.30. Banner bertuliskan tuntutan dibentangkan memenuhi jalan dan massa menduduki Jalan Malioboro.

Seorang peserta aksi sekaligus eks pedagang Teras Malioboro 2, Supriyati, mengatakan aksi blokade itu didasari penilaian pedagang bahwa DPRD DIY tidak serius menangani kasus relokasi. Selain itu sikap tersebut merupakan kemarahan para pedagang yang melihat para anggota parlemen seakan tutup mata dan telinga terhadap aspirasi yang disampaikan.

"Ini tetangga sendiri, pedagang TM 2 yang lokasinya berdekatan dengan Gedung DPRD DIY, minimal tahu permasalahannya apa," ujarnya.

Blokade tersebut juga merupakan bentuk penekanan kepada para pejabat dan anggota dewan agar mereka turun dan mendengar keluhan kesah langsung dari para pedagang. Mereka merasa penjualan di lokasi baru masih sepi, dan berharap pemerintah daerah memberikan kepastian serta fasilitas yang lebih untuk mendukung kelangsungan usaha mereka.

Dalam aksi demonstrasi pada pekan lalu, pedagang menuntut beberapa hal, di antaranya jaminan hidup pasca relokasi, transparansi proses relokasi, serta penerapan tata kota yang lebih partisipatif. Mereka juga menuntut agar Malioboro sebagai ruang publik tetap dapat memberikan manfaat yang merata bagi seluruh pihak.

Kesepakatan

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Beny Suharsono, menegaskan bahwa pemerintah daerah telah mengakomodasi jaminan hidup bagi

pedagang yang terdampak relokasi. Menurutnya, sejak awal telah ada kesepakatan bersama antara pemerintah dan pedagang yang mencakup perpindahan dalam jangka waktu dua tahun serta berbagai fasilitas pendukung, seperti kebersihan, air, dan keamanan.

"Jaminan hidupnya sudah ada, supaya mereka bisa bersaing di pasar. Ini adalah bagian dari mekanisme pasar yang membutuhkan adaptasi," kata Beny.

Pemerintah, lanjut Beny, terus berupaya memberikan dukungan bagi pedagang, termasuk dengan strategi promosi dan pertunjukan untuk menarik pengunjung ke Teras Malioboro. Namun, ia menekankan bahwa keberhasilan berjualan bukan hanya bergantung pada lokasi yang ditentukan, melainkan juga pada daya saing pedagang itu sendiri.

"Menjual produk yang sama di satu lokasi bukanlah strategi yang efektif. Pedagang perlu berinovasi agar tetap diminati pembeli," ujarnya.

Beny juga menghormati hak para pedagang untuk menyuarakan aspirasi mereka melalui aksi unjuk rasa, namun ia menekankan pentingnya dialog untuk mencapai solusi terbaik tanpa harus berlarut-larut dalam demonstrasi. "Kami terbuka untuk berdialog. Kalau bisa dialog, syukur. Kalau tidak, itu hak mereka dan kami hormati," jelasnya.

Pemerintah, kata Beny, juga telah melakukan pendataan yang sangat rinci terhadap seluruh pedagang terdampak relokasi, untuk memastikan mereka menerima dukungan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. (hda/han)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 02 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005